

**PRIORITAS DAN PLAFON  
ANGGARAN SEMENENTARA  
APBD (PPAS)**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAJAWA, NOVEMBER 2022**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA**

NOMOR : 21/NK/HK/2022  
9/NK/DPRD/2022  
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2022

**TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : RAYMUNDUS BENA, S.S.,M.HUM.  
Jabatan : Wakil Bupati Ngada  
Alamat Kantor : Bajawa

Bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Ngada

2. a. Nama : Bernadinus Dhey Ngebu, S.P.  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ngada  
Alamat Kantor : Bajawa
- b. Nama : Peterus Ngabi  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngada  
Alamat Kantor : Bajawa
- c. Nama : Aloysius Soa  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngada  
Alamat Kantor : Bajawa

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Bajawa, 15 November 2022

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN NGADA**  
Selaku,  
**PIHAK KEDUA**

**WAKIL BUPATI NGADA,**  
Selaku,  
**PIHAK PERTAMA**

**BERNADINUS DHEY NGEBU, S.P.**  
KETUA

**PETERUS NGABI**  
WAKIL KETUA

**ALOYSIUS SOA**  
WAKIL KETUA

**RAYMUNDUS BENA, S.S.,M.HUM.**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen sementara yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk mendanai program dan kegiatan. Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2022 berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Prioritas belanja daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, sasaran yang ingin dicapai, Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan program/kegiatan yang terkait dan nama program. Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan urusan pemerintahan, SKPD, program/kegiatan dan belanja tidak langsung dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pembahasan rancangan PPAS Tahun 2023 antara legislatif dan eksekutif, terdapat beberapa perbedaan analisis terhadap pendapatan dan belanja daerah. Hal ini akan mengakibatkan perbedaan antara pendapatan dan belanja yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 dan dengan KUA Tahun Anggaran 2023 maupun dengan PPAS Tahun Anggaran 2023. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) RAPBD Tahun 2023 pada setiap Perangkat Daerah (PD).

Sebagaimana yang telah dibahas pada asumsi-asumsi KUA, salah satu kondisi yang berpengaruh cukup signifikan adalah terkait adanya kebijakan pemerintah tentang Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya (*Specific Grant*) dan Dana Transfer ke Daerah yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Block Grant*), berpengaruh terhadap besaran alokasi anggaran pada perangkat daerah.

Pada satu sisi kebijakan ini membantu pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar di sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar melalui Dinas PUPR, namun pada sisi lain kebijakan ini berdampak pada besaran alokasi DTU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Block Grant*) menjadi sangat terbatas. Hal ini tentu membuat pemerintah daerah, mengalami kesulitan fiskal untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas daerah pada Tahun Anggaran 2023. Dengan demikian, postur APBD Tahun 2023 dan target-target output dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah dalam mencapai target RPJMD 2021-2026 dengan fokusnya "**Tante Nela Paris**" mengalami keterbatasan alokasi anggaran yang cukup signifikan.

Melalui alokasi anggaran *Specific Grant*, Pemerintah Daerah tetap berupaya melakukan percepatan terwujudnya pancapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui upaya untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, baik dalam maupun luar daerah melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar wilayah dan infrastruktur antar wilayah dari dan menuju kantong-kantong produksi. Sedangkan pada sektor yang lainnya, Pemerintah tetap melanjutkan Pembangunan yang telah dilakukan selama ini melalui 5 misi pembangunan daerah.

Keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023, sangat ditentukan oleh komitmen bersama untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab antara pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan, DPRD yang akan mengawasi seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan dan seluruh *stakeholders* yang ada di Kabupaten Ngada serta seluruh komponen masyarakat yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan, sehingga cita-cita bersama dalam rangka mencapai Visi pembangunan 2021-2026, yaitu "**Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan**", dapat terwujud.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen sementara yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk mendanai program dan kegiatan disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi seluruh instansi/Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan di Kabupaten Ngada dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

## **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemerintah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 - 2026

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 - 2026;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012 - 2032;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022 Nomor 51);



## BAB II

### RENCANA PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain - lain pendapatan daerah yang sah, maupun sumber peneriman pembiayaan daerah yang meliputi SiLPA dan pinjaman daerah akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 2.1. Rencana Penerimaan Daerah

Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 860,226,224,181,- dengan rincian: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 61,385,559,006,- Pendapatan Transfer sebesar Rp. 791,667,561,305,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 7,173,103,870,-.

Rincian Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari Penerimaan Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 9,781,600,000,- Penerimaan Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 10,244,918,000,- Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 3,800,000,000,- dan penerimaan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 37,559,041,006,-

Perlu kiranya dijelaskan bahwa sesungguhnya secara riil Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain PAD yang sah adalah sebesar Rp. 27.387.500.000,-. Namun sebagaimana telah dibahas bersama antara Pemerintah dan DPRD pada sidang Perubahan APBD 2022, Pemerintah perlu mencatat kembali selisih Kas Daerah pada Bank NTT sebesar Rp. 10.171.541.006,- Pada aspek pendapatan, selisih Kas Daerah pada Bank NTT dimaksud dicatat pada akun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dan pada sisi pengeluaran dicatat pada akun Penyertaan Modal Daerah pada komponen Pembiayaan Daerah.

Selanjutnya Pendapatan Transfer pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar 791,667,561,305,- Secara terinci, Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 4.260.796.000,- Dana Transfer Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Block Grant*) sebesar Rp. 323.029.707.000,- Dana Transfer Umum yang Telah Ditentukan Penggunaannya (*Specific Grant*) sebesar Rp.

136.565.983.000,- Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) sebesar Rp. 100.319.892.000, Dana Alokasi Khusus Non-Fisik (DAK- Non Fisik) sebesar Rp. 109.508.081.000,- Dana Desa sebesar Rp. 104.123.513.000 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 13.859.589.305.

Sedangkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pendapatan Dana JKN Kapitasi pada FKTP sebesar Rp. 7.173.103.870,-

## 2.2. Penerimaan Pembiayaan

Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Ngada mengalokasikan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 45,615,548,048,- yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 45,615,548,048,-
- b. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 53.171.541.006,- yang direncanakan untuk Penyertaan Modal ke Bank NTT sebesar Rp. 10.171.541.006,- Pembentukan Dana Cadangan Pemilukada sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp. 40.000.000.000,-  
Penyertaan Modal ke Bank NTT sebesar Rp. 10.171.541.006,- pencatatan kembali selisih Kas Daerah pada Bank NTT.

### Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61,385,559,006
4.1.01	Pajak Daerah	9,781,600,000
4.1.02	Retribusi Daerah	10,244,918,000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,800,000,000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	37,559,041,006
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	791,667,561,305
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	777,807,972,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13,859,589,305

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7,173,103,870
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7,173,103,870
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	860,226,224,181
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45,615,548,048
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45,615,548,048
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	45,615,548,048

<https://ngadakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?t/vCxDmYcStOZ/UNkFOGYX2utCASwVwiQQIPQjYzW2G1qBbL@yaYw53JUzV3TtwAlu/azJmfY/x4eAi7C6ltT421TPy/j013bnksBnaf2zMnHQWm...> 1/1

### BAB III

## RENCANA PRIORITAS BELANJA DAERAH

### A. SINERGITAS

Sinergitas sasaran pokok pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sangat diperlukan dalam mempercepat capaian pembangunan Nasional. Adapun sinergitas Sasaran Pokok RKP, RKPD NTT dengan RKPD Tahun 2022 Kabupaten Ngada dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Target Pencapaian Indikator Makro Ekonomi Nasional, NTT dan Kabupaten Ngada**

No.	Indikator	Target 2023		
		Nasional	NTT	Ngada
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,0 - 5,5	6,33 - 6,90	4,91 %
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,5 - 6,2	19,35 - 16,15	11,14 %
3	Tingkat pengangguran (%)	4,8 - 5,1	2,5 - 1,9	3,78
4	IPM	73,44 - 73,48	67,35 - 69,00	69,3

Sumber: RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2023

**Tabel 3.2**  
**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Dengan Prioritas Pembangunan Nasional**

Dapat dilihat pada lampiran berikut.

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik		
				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Sakip Perangkat Daerah		
				DINAS PETERNAKAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			- presentase klpk ternak yg menerapkan IPTEK Produksi		
				DINAS PETERNAKAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			- presentase klmpk peternak yg mendapatkan akses permodalan		
				DINAS PETERNAKAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Tingkat Kematian Ternak		
				DINAS PETERNAKAN	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Presentase Toko Pakan Ternak Terdaftar		
				DINAS PETERNAKAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			0Presentase barang milik daerah yang diinventarisasi		
				BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				

2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Capaian Nilai Sakip		
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
	Prosentase Peningkatan Potensi investasi yang teridentifikasi		
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
	Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP		
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
	Tingkat kemudahan perizinan investasi		
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Nilai Sakip Perangkat Daerah		
		SEKRETARIAT DPRD	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Nilai Sakip Perangkat Daerah		
		SEKRETARIAT DPRD	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
	Persentase layanan dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar		
		SEKRETARIAT DPRD	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
	Persentase layanan dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar		
		SEKRETARIAT DPRD	

4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
	Persentase bangunan gedung sesuai dengan standar		
			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
	Persentase panjang jalan pada ruas Prioritas dalam kondisi baik		
			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
	Prosentase Peningkatan Potensi investasi yang teridentifikasi		
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
	Persentase titik genangan air di IKK yang tertangani		
			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran		
			DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran		
			DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Tabel 3.3**  
**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan**  
**Prioritas Pembangunan Provinsi**

Dapat dilihat pada lampiran berikut:

## Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
68	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	DINAS PARIWISATA	123.445.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	---	DINAS PARIWISATA	916.125.500
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	---	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	211.299.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	14.595.000
69	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	---	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.197.604.260
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	---	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	254.400.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	---	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.376.204.000
71	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	210.760.587
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung sesuai dengan standar	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	1.435.570.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.075.583.468
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	---	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.872.723.000
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	---	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	231.010.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	KECAMATAN BAJAWA	173.749.091
				KECAMATAN GOLEWA	41.249.891
				KECAMATAN GOLEWA SELATAN	22.591.600
				KECAMATAN AIMERE	31.753.351



## Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			---		
				KECAMATAN BAJAWA	10.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			---		
				KECAMATAN BAJAWA	1.690.000.000
				KECAMATAN GOLEWA	375.000.000
				KECAMATAN GOLEWA BARAT	170.000.000
				KECAMATAN AIMERE	200.000.000
72	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.				
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			---		
				SEKRETARIAT DAERAH	2.146.830.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			---		
				KECAMATAN GOLEWA	15.484.360
				KECAMATAN JEREBUU	16.738.335
				KECAMATAN RIUNG	6.399.850
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			---		
				KECAMATAN BAJAWA	140.000.000
				KECAMATAN RIUNG	40.000.000

**Tabel 3.3**  
**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1			Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup					
		---						
		PROGRAM	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			---					
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	360.000.000		
		PROGRAM	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			---					
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	24.999.750		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			---					
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.509.734.400		
		PROGRAM	PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			---					
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	8.828.045.018		
		PROGRAM	PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase	berizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	350.000.000		
		PROGRAM	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Tingkat kemudahan	perizinan investasi				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	521.700.000		
		PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			---					
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.483.927.851		
					DINAS PARIWISATA	1.875.891.699		
		PROGRAM	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			---					
					DINAS PARIWISATA	2.796.295.200		
		PROGRAM	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			---					
					DINAS PARIWISATA	916.125.500		
		PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			---					
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	11.155.562.635		
		PROGRAM	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			---					
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	211.299.000		
		PROGRAM	PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Tingkat Kematian Ternak					
					DINAS PETERNAKAN	2.222.015.000		
		PROGRAM	PENYULUHAN PERTANIAN					

## Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				---				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.338.000.000		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				---				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	90.000.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.157.091.092		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				---				
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.872.723.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---				
					KECAMATAN JEREBUJ	837.871.213		
<b>2</b>	<b>Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia</b>							
		---						
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				---				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	116.857.577.970		
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				---				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	941.461.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---				
					DINAS KESEHATAN	79.697.677.364		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				---				
					DINAS KESEHATAN	69.971.365.289		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				---				
					DINAS KESEHATAN	12.660.280.000		
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				---				
					DINAS KESEHATAN	39.100.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	4.869.915.386		
				---				
					DINAS SOSIAL	1.118.420.640		
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	90.568.500		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				---				

## Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	254.400.000		
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				---				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.816.903.727		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				---				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.320.900.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---				
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.197.742		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				---				
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.989.400		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.296.728.808		
					KECAMATAN BAJAWA UTARA	6.848.000		
3	Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar							
		---						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	1.539.233.687		
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	2.022.760.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase Rumah Tangga memiliki akses SPAM				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	13.396.308.800		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	5.459.507.000		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Persentase bangunan gedung sesuai dengan standar				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	1.435.570.000		

## Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Persentase panjang jalan pada ruas Prioritas dalam kondisi baik				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	41.813.556.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Presentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih diwilayah kabupaten/kota				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	150.003.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				---				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	468.269.000		
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				---				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	1.443.445.000		
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				---				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	50.000.000		
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
				---				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	130.000.000		
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					
				---				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	500.000.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---				
					DINAS PERHUBUNGAN	1.974.918.282		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA))					
				---				
					DINAS PERHUBUNGAN	1.601.922.000		
<b>4</b>			<b>Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani</b>					
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Sakip Perangkat Daerah				
					SEKRETARIAT DPRD	12.110.635.030		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Persentase layanan dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar				
					SEKRETARIAT DPRD	902.563.700		
			Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas					
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					

## Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA			
					DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20.183.990	
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KK			
					DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20.183.990	
				Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP			
					DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20.183.990	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran			
					DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20.962.350	
		---					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				---			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	125.154.500	
				Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	46.872.000	
				---			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	113.950.320	
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.483.696.753	
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.102.081.945	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.516.591.317	
					DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.549.933.823	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
				---			
					DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	294.007.330	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
				---			
					DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.763.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai SAKIP OPD			
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	76.728.421	
				---			

## Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	1.919.932.200		
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.261.360.887		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				---				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	55.030.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				---				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	158.470.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1.476.217.753		
			Capaian Nilai Sakip					
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	19.982.100		
				---				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	43.678.471		
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.110.551.432		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				---				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	35.183.500		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	19.732.400		
			Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah					
					DINAS PETERNAKAN	114.390.650		
			Nilai Sakip Perangkat Daerah					
					DINAS PETERNAKAN	3.732.638.378		
				---				
					DINAS PETERNAKAN	20.000.000		
					SEKRETARIAT DAERAH	8.258.677.079		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				---				
					SEKRETARIAT DAERAH	2.320.379.900		
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				---				
					SEKRETARIAT DAERAH	745.313.250		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---				

## Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.504.955.374		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				---				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	414.220.000		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				---				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	145.145.600		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---				
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.384.454.062		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				---				
					BADAN PENDAPATAN DAERAH	279.062.100		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	2.025.934.249		
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				---				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	412.000.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				---				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	3.361.682.000		
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				---				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	31.062.500		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---				
					INSPEKTORAT	2.934.729.962		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				---				
					INSPEKTORAT	200.049.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---				
					KECAMATAN BAJAWA	4.072.334.606		
					KECAMATAN GOLEWA	1.769.073.293		
					KECAMATAN BAJAWA UTARA	829.579.811		
					KECAMATAN GOLEWA SELATAN	759.323.018		



## Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					KECAMATAN GOLEWA BARAT	69.169.752		
					KECAMATAN AIMERE	1.457.006.812		
					KECAMATAN JEREBUU	8.196.335		
					KECAMATAN INERIE	1.169.202.583		
					KECAMATAN SOA	1.383.756.330		
					KECAMATAN WOLOMEZE	911.519.944		
					KECAMATAN RIUNG	2.525.524.460		
					KECAMATAN RIUNG BARAT	1.309.205.508		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			---					
					KECAMATAN BAJAWA	10.000.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			---					
					KECAMATAN BAJAWA	1.830.000.000		
					KECAMATAN GOLEWA	400.000.000		
					KECAMATAN GOLEWA BARAT	200.000.000		
					KECAMATAN AIMERE	400.000.000		
					KECAMATAN RIUNG	400.000.000		
<b>5</b>	<b>Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya</b>							
		---						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		---						
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	3.297.168.346		
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
		---						
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	312.000.000		
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						
		---						
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	4.950.000		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
		---						
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	242.938.000		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		---						
					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10.611.317.041		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
		---						
					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	165.056.674.400		
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
			0Prosentase barang milik daerah yang diinventarisasi					

## Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	522.012.600		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.361.000.469		
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				---				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	708.583.200		
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				---				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	997.999.950		

## B. PRIORITAS BELANJA

Memperhatikan kebijakan prioritas pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024, prioritas provinsi dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2019 - 2023, RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2006 - 2026 dan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2021- 2026 serta kemampuan keuangan daerah, maka rencana belanja diarahkan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Periode tahun 2021 sampai tahun 2026. Tema Pembangunan kabupaten Ngada tahun 2023 adalah **“Penguatan kelembagaan dan nilai tambah Tante Nela Paris berbasis *eco-region* dan *eco-tourism*”**.

Sesuai dengan arahan RPJMD dan tema pembangunan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Ngada pada tahun 2023 menekankan pada 4 hal utama sebagai prioritas yakni :

1. **Misi pertama** : Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dengan prioritas pada :
  - a) Pengembangan Komoditi Pertanian, Perkebunan Berbasis Zona Agroekologi sehingga mendapatkan hasil yang optimal.
  - b) Peningkatan dan optimalisasi Sarana dan Prasarana Tante Nela Paris untuk mendukung produksi dan produktivitas.
  - c) Peningkatan Pengolahan Hasil Pasca Panen untuk mendapatkan nilai tambah (*value added*) dan untuk penyerapan tenaga kerja.
  - d) Peningkatan Kualitas Kontrol Terhadap Produk Organik melalui metode *marketing mix* ( *Product* (produk), *Price* (harga), *Promotion* (promosi), dan *Place* (tempat) untuk mendukung KSPN Labuan Bajo.
  - e) Optimalisasi Destinasi Wisata untuk meningkatkan Daya Tarik Wisata berbasis masyarakat yang tergabung dalam POKDARWIS.
  - f) Peningkatan *spend of money* wisatawan dalam negeri melalui pengembangan ekonomi kreatif.
  - g) Peningkatan kelancaran distribusi barang perdagangan.

h) Peningkatan perlindungan konservasi Daerah Aliran Sungai.

2. **Misi kedua** : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan prioritas pada :

- a) Peningkatan pemerataan fasilitas Pendidikan dasar dan penataan manajemen SDM pendidikan.
- b) Optimalisasi pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita dan Peningkatan pelayanan kesehatan anak, penduduk usia produktif dan lansia.
- c) Peningkatan Pengelolaan bidang olahraga serta peran kelompok pemuda dalam pembangunan.
- d) Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- e) Peningkatan kesempatan kerja.

3. **Misi Ketiga** : Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar dengan prioritas pada :

- a) Penataan Kota Bajawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, serta distribusi pusat-pusat pertumbuhan baru ke wilayah yang belum berkembang.
- b) Peningkatan akses pemukiman layak huni yang meliputi akses rumah layak huni, ketersediaan dan kualitas infrastruktur lingkungan dan akses air minum serta sanitasi nyaman.
- c) Penguatan Fungsi Kawasan dengan menyiapkan aksesibilitas.
- d) Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana.

4. **Misi keempat** : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, dan Melayani dengan prioritas pada :

- a) Peningkatan efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah.
- b) Optimalisasi BUMD dalam pengelolaan potensi/asset daerah dan meningkatkan PAD.
- c) Peningkatan kualitas management ASN berbasis System Merit.
- d) Peningkatan kapasitas PAD.
- e) Percepatan implementasi SPBE.

5. **Misi Kelima** : Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat Melalui Transformasi Institusi Budaya dengan prioritas pada :

- a) Optimalisasi Lembaga kemasyarakatan desa.
- b) Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi ekonomi dan lingkungan desa.
- c) Peningkatan kapasitas BUMDes dan BUMDesMa dalam mengelola potensi/asset desa dan potensi wilayah desa.
- d) Penguatan Kelembagaan Transformasi budaya daerah.

Rencana Belanja Daerah pada Rancangan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023 digambarkan sebagai berikut:

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>542,213.959.808</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	355.563.305.563
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.876.679.045
5.1.03	Belanja Bunga	4.625.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	3.535.283.200
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.075.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>150.961.310.015</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.890.459.585
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.444.821.170
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.362.091.080
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.263.938.180
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.500.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>151,533.653.400</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.024.491.800
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	150,509,161,600
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>852,670,231,223</b>

## **BAB IV**

### **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

#### **A. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan**

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang mengacu pada Pasal 12 Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing mengacu pada Urusan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, terdiri dari:
  1. Urusan Pendidikan.
  2. Urusan Kesehatan.
  3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
  5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
  6. Urusan Sosial.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
  1. Urusan Tenaga Kerja.
  2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  3. Urusan Pangan.
  4. Urusan Pertanahan.
  5. Urusan Lingkungan Hidup.
  6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  9. Urusan Perhubungan.
  10. Urusan Komunikasi dan Informatika.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
  12. Urusan Penanaman Modal.
  13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.
  14. Urusan Statistik.
  15. Urusan Persandian.
  16. Urusan Kebudayaan.
  17. Urusan Perpustakaan.
  18. Urusan Kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari:
1. Urusan Pertanian.
  2. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
  3. Urusan Pariwisata.
  4. Urusan Kelautan dan Perikanan.
  5. Urusan Perdagangan.
  6. Urusan Kehutanan.
  7. Urusan Perindustrian.
  8. Urusan Transmigrasi.
- d. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan
1. Urusan Perencanaan.
  2. Urusan Keuangan.
  3. Urusan Kepegawaian.
  4. Urusan Penelitian dan Pengembangan.
  5. Urusan Sekretariat DPRD.
  6. Urusan Sekretariat Daerah.
  7. Urusan Inspektorat.

Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah/Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan tersebut dituangkan dalam Lampiran 2 Dokumen PPAS ini.

**Tabel 4.1**  
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
(Lihat pada tabel berikut)

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	293.848.555.266	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	293.848.555.266	
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	293.848.555.266	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	160.955.778.914	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.000.000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	160.779.640.516	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	160.779.640.516	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.571.500	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.930.500	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.500.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.141.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.566.898	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.842.898	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.724.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	131.951.315.352	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	87.557.311.132	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.800.000.000	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	15.093.737.382	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.135.780.000	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	2.847.499.750	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	39.301.961.000	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	483.899.000	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	10.800.000.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	14.633.910.000	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	460.524.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	35.752.483.270	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.714.006.260	
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.022.190.000	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	1.626.749.000	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	525.153.000	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	13.971.877.010	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	297.503.000	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	511.095.000	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	675.000.000	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	775.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	14.633.910.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.058.420.950	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	526.601.500	
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	5.014.669.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	82.996.450	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	126.690.000	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	169.255.000	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	34.609.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.103.600.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	583.100.000	



## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	583.100.000	
<b>1.01.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>941.461.000</b>	
<b>1.01.04.2.01</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>941.461.000</b>	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	651.460.000	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	290.001.000	
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>162.368.422.653</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>162.368.422.653</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>91.892.981.453</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>37.501.693.034</b>	
<b>1.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>220.380.000</b>	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.320.000	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.320.000	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	187.740.000	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>36.188.052.106</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.106.452.106	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.280.000	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.320.000	
<b>1.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>81.600.000</b>	
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	32.640.000	
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48.960.000	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>229.169.000</b>	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.499.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.250.000	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.750.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.670.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>710.445.928</b>	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	57.750.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.695.928	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450.000.000	
<b>1.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>72.046.000</b>	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.046.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>49.166.908.419</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18.170.869.790</b>	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.351.146.790	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11.588.893.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	3.155.830.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	75.000.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30.996.038.629</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.396.071.429	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.599.967.200	
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>5.185.280.000</b>	
<b>1.02.03.2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.185.280.000</b>	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	5.185.280.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>39.100.000</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	39.100.000	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	39.100.000	
1.02.0.00.0.00.01.0001	RSUD Bajawa	63.302.337.330	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.195.984.330	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.591.404.475	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.591.404.475	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.929.550	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.991.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140.938.550	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	663.848.905	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	245.848.905	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418.000.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.801.400	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238.801.400	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	22.500.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	22.500.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	13.631.353.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.631.353.000	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	10.451.314.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	180.039.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.475.000.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	7.475.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	7.475.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0016	PUSKESMAS AIMERE	7.173.103.870	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.173.103.870	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.173.103.870	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7.173.103.870	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	71.315.945.193	
1.04.1.03.2.10.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	71.315.945.193	
1.04.1.03.2.10.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	71.315.945.193	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.569.971.393	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.800.000	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.320.000	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.480.000	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.916.787.386	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.869.915.386	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.872.000	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.800.000	
1.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52.800.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	376.840.050	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.570.000	
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.279.000	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.701.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.290.050	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.700.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	271.300.000	
<b>1.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>63.673.485</b>	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.673.485	
<b>1.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>42.576.052</b>	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.076.052	
<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.088.494.420</b>	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.148.100	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.321.320	
1.03.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.000.025.000	
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>2.022.760.000</b>	
<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.022.760.000</b>	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.022.760.000	
<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>13.396.308.800</b>	
<b>1.03.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>13.396.308.800</b>	
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	13.396.308.800	
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>5.459.507.000</b>	
<b>1.03.05.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.459.507.000</b>	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.459.507.000	
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>1.435.570.000</b>	
<b>1.03.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>1.435.570.000</b>	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	341.050.000	
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.094.520.000	
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>41.813.556.000</b>	
<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>41.813.556.000</b>	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	36.503.336.000	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	1.218.020.000	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	4.092.200.000	
<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>150.003.000</b>	
<b>1.03.11.2.04</b>	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>150.003.000</b>	
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	150.003.000	
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>468.269.000</b>	
<b>1.03.12.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>368.799.000</b>	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	368.799.000	
<b>1.03.12.2.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>99.470.000</b>	
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	99.470.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.091.483.942	
1.04.1.03.2.10.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	7.091.483.942	
1.04.1.03.2.10.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	7.091.483.942	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.665.585.700	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.665.585.700	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.443.445.000	
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	222.140.700	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.425.898.242	
1.04.05.2.01	Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.425.898.242	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.425.898.242	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5.147.815.099	
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	3.614.118.346	
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	3.614.118.346	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.297.168.346	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.240.262.886	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.240.262.886	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.510.550	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.505.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.005.550	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.678.110	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.678.110	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.716.800	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.716.800	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	312.000.000	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	312.000.000	
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	312.000.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	4.950.000	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemdaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.950.000	
1.05.04.2.01.02	Pemdaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.950.000	
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.533.696.753	
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.533.696.753	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.483.696.753	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.360.931.033	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.360.931.033	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.399.600	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.399.600	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.408.120	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.408.120	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.958.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.958.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	50.000.000	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.000.000	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.118.420.640	
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	1.118.420.640	
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	1.118.420.640	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.118.420.640	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.052.727.228	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.052.727.228	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.096.650	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.672.000	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.424.650	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.601.262	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.601.262	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.995.500	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.995.500	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.102.081.945	
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.102.081.945	
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.102.081.945	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.102.081.945	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.048.500.345	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.048.500.345	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.739.400	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.563.000	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.333.400	
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.848.000	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.995.000	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.824.200	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.824.200	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.018.000	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.018.000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	360.000.000	
3.27.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	360.000.000	
3.27.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	360.000.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	360.000.000	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	360.000.000	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	360.000.000	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	630.000.000	
1.04.1.03.2.10.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	630.000.000	
1.04.1.03.2.10.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	630.000.000	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	130.000.000	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000	
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	500.000.000	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	500.000.000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5.051.325.467	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.051.325.467	
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.051.325.467	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.516.591.317	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.447.006.690	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.447.006.690	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.093.000	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.493.000	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.600.000	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.657.827	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.657.827	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.833.800	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.833.800	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	24.999.750	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	24.999.750	
2.11.04.2.01.03	Pengelolaan Kebun Raya	24.999.750	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.509.734.400	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	3.509.734.400	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	741.930.400	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.767.804.000	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.899.850.493	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.899.850.493	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.899.850.493	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.549.933.823	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.495.941.678	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.495.941.678	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.315.200	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.442.000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.873.200	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.878.705	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.878.705	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.798.240	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.798.240	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	314.191.320	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20.183.990	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20.183.990	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	294.007.330	
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	294.007.330	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	20.962.350	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	20.962.350	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	20.962.350	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	14.763.000	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14.763.000	
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	14.763.000	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.996.660.621	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.2.13.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	1.996.660.621	
2.08.2.13.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	1.996.660.621	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.996.660.621	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.919.932.200	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.919.932.200	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.235.300	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.566.000	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.669.300	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.496.621	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.496.621	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.996.500	
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.996.500	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.302.848.585	
2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.302.848.585	
2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.302.848.585	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	910.644.858	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	820.076.358	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	820.076.358	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.060.000	
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.560.000	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.500.000	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.866.300	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.266.300	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.600.000	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.642.200	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.642.200	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	254.400.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	254.400.000	
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	136.200.000	
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	118.200.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.816.903.727	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.503.800.000	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.000.000	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	420.000.000	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	156.000.000	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	577.800.000	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.158.603.000	
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	2.158.603.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	984.000.727	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20.699.727	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	949.201.000	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.100.000	
2.14.03.2.04	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>1.170.500.000</b>	
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	805.000.000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	365.500.000	
2.14.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>1.320.900.000</b>	
2.14.04.2.01	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>1.320.900.000</b>	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	960.900.000	
2.15	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>3.576.840.282</b>	
2.15.0.00.0.00.01.0000	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>3.576.840.282</b>	
2.15.0.00.0.00.01.0000	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>3.576.840.282</b>	
2.15.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.974.918.282</b>	
2.15.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.803.372.169</b>	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.803.372.169	
2.15.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>22.097.350</b>	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.375.000	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.722.350	
2.15.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>16.203.563</b>	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.203.563	
2.15.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>133.245.200</b>	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.245.200	
2.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>1.601.922.000</b>	
2.15.02.2.05	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>1.601.922.000</b>	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.601.922.000	
2.16	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>1.474.860.887</b>	
2.16.2.21.0.00.01.0000	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>1.474.860.887</b>	
2.16.2.21.0.00.01.0000	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>1.474.860.887</b>	
2.16.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.261.360.887</b>	
2.16.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.189.261.043</b>	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.189.261.043	
2.16.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>16.953.150</b>	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.804.000	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.149.150	
2.16.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>35.145.894</b>	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.145.894	
2.16.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>20.000.800</b>	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.800	
2.16.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>55.030.000</b>	
2.16.02.2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>55.030.000</b>	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	55.030.000	



## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	158.470.000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	158.470.000	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	158.470.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	10.304.262.771	
2.17.3.30.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	10.304.262.771	
2.17.3.30.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	10.304.262.771	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.476.217.753	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.421.713.753	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.421.713.753	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.498.700	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.899.000	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.599.700	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.077.500	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.077.500	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.927.800	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.927.800	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	8.828.045.018	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	8.828.045.018	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	8.828.045.018	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.623.253.043	
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.623.253.043	
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.623.253.043	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.751.553.043	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.687.892.472	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.687.892.472	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.222.750	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.679.000	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.543.750	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.455.721	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.455.721	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.982.100	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.982.100	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	350.000.000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	350.000.000	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	350.000.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	521.700.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	521.700.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	521.700.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.125.738.574	
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.125.738.574	
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.125.738.574	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.115.749.174	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.070.671.806	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.070.671.806	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	13.779.152	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.581.410	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.197.742	
2.19.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	10.237.956	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.237.956	
2.19.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	21.060.260	
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.060.260	
2.19.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	9.989.400	
2.19.02.2.01	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	9.989.400	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	9.989.400	
2.20	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	35.183.500	
5.01.5.05.1.03.01.0000	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	35.183.500	
5.01.5.05.1.03.01.0000	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	35.183.500	
5.01.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	35.183.500	
5.01.02.2.02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	35.183.500	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	35.183.500	
2.22	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	242.938.000	
1.01.2.22.0.00.01.0000	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	242.938.000	
1.01.2.22.0.00.01.0000	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	242.938.000	
2.22.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	242.938.000	
2.22.02.2.01	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	242.938.000	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	242.938.000	
2.24	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	1.316.461.208	
2.23.2.24.0.00.01.0000	<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>	1.316.461.208	
2.23.2.24.0.00.01.0000	<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>	1.316.461.208	
2.24.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1.316.461.208	
2.24.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1.271.773.555	
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.271.773.555	
2.24.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	10.495.300	
2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.079.000	
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.416.300	
2.24.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	14.459.953	
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.459.953	
2.24.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	19.732.400	
2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.732.400	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		
3.25	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	1.483.927.851	
3.25.0.00.0.00.01.0000	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	1.483.927.851	
3.25.0.00.0.00.01.0000	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	1.483.927.851	
3.25.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1.483.927.851	
3.25.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1.418.151.635	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.418.151.635	
3.25.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	28.837.500	
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.837.500	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	16.939.216	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.939.216	
3.25.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	19.999.500	
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.999.500	
3.26	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	5.588.312.399	
3.26.0.00.0.00.01.0000	<b>DINAS PARIWISATA</b>	5.588.312.399	
3.26.0.00.0.00.01.0000	<b>DINAS PARIWISATA</b>	5.588.312.399	
3.26.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1.875.891.699	
3.26.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1.752.446.699	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.752.446.699	
3.26.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	26.400.000	
3.26.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	26.400.000	
3.26.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	33.295.000	
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.295.000	
3.26.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	43.750.000	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.750.000	
3.26.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	20.000.000	
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	
3.26.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	2.796.295.200	
3.26.02.2.01	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	94.700.000	
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	94.700.000	
3.26.02.2.03	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	2.701.595.200	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.218.794.000	
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	482.801.200	
3.26.05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	916.125.500	
3.26.05.2.01	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	910.661.800	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	910.661.800	
3.26.05.2.02	<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	5.463.700	
3.26.05.2.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	5.463.700	
3.27	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	18.553.865.213	
3.27.0.00.0.00.02.0000	<b>DINAS PETERNAKAN</b>	5.849.003.578	
3.27.0.00.0.00.02.0000	<b>DINAS PETERNAKAN</b>	5.849.003.578	
3.27.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	3.889.688.578	
3.27.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	3.732.638.378	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.732.638.378	
3.27.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	42.659.550	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.659.550	
3.27.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	74.107.350	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.107.350	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000	
3.27.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	40.283.300	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.283.300	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.959.315.000	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	262.700.000	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	262.700.000	
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	14.790.000	
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	14.790.000	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.681.825.000	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1.681.825.000	
3.27.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	12.704.861.635	
3.27.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	12.493.562.635	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.155.562.635	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.997.941.822	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.997.941.822	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.467.750	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.650.000	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.817.750	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.761.063	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.761.063	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.392.000	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.392.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.338.000.000	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.338.000.000	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.338.000.000	
3.27.2.09.0.00.01.0001	UPTD PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	211.299.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	211.299.000	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	211.299.000	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	211.299.000	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	90.000.000	
3.31.3.30.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	90.000.000	
3.31.3.30.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	90.000.000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	90.000.000	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	90.000.000	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	90.000.000	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	6.029.814.092	
3.31.3.30.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.029.814.092	
3.31.3.30.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.029.814.092	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.157.091.092	
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.075.583.468	
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.075.583.468	
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	
3.31.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6.000.000	
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.255.000	
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.595.000	
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.660.000	
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.768.624	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.768.624	
<b>3.31.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>20.484.000</b>	
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.484.000	
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>4.872.723.000</b>	
<b>3.31.02.2.01</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>4.872.723.000</b>	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4.872.723.000	
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>11.908.017.229</b>	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>11.908.017.229</b>	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>BAGIAN UMUM</b>	<b>8.182.207.579</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.182.207.579</b>	
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.824.456.310</b>	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.824.456.310	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>835.191.700</b>	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	189.305.750	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.901.750	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.998.200	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	499.986.000	
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>136.441.059</b>	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.441.059	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>330.387.850</b>	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	330.387.850	
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>475.244.101</b>	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	475.244.101	
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>580.486.559</b>	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	311.175.342	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	269.311.217	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>100.000.000</b>	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	62.350.000	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	37.650.000	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0003</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>1.308.960.250</b>	
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1.308.960.250</b>	
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>122.240.000</b>	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	30.200.000	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	57.500.000	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	34.540.000	
<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>1.186.720.250</b>	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	275.220.750	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	583.647.000	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	327.852.500	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0004</b>	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>	<b>50.019.500</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>50.019.500</b>	
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>50.019.500</b>	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	50.019.500	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0007</b>	<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>	<b>99.999.900</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.450.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.450.000	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.450.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	73.549.900	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	49.999.900	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	49.999.900	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	23.550.000	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	23.550.000	
4.01.0.00.0.00.01.0008	BAGIAN EKONOMI	20.000.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	20.000.000	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	20.000.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	20.000.000	
4.01.0.00.0.00.01.0016	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.146.830.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.146.830.000	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.146.830.000	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.146.830.000	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	13.013.198.730	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	13.013.198.730	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	13.013.198.730	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.110.635.030	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.336.000	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.336.000	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.644.477.156	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.644.477.156	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.155.150	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.820.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.335.150	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.871.842	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.871.842	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.132.800	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.132.800	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	9.554.052.082	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	9.554.052.082	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	613.610.000	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	193.610.000	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	420.000.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	902.563.700	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	247.813.700	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	110.972.300	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	136.841.400	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	654.750.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	654.750.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	2.064.320.974	
5.01.5.05.1.03.01.0000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.064.320.974	
5.01.5.05.1.03.01.0000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.064.320.974	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.504.955.374	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.393.017.976	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.393.017.976	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	12.000.000	
5.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12.000.000	
5.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	48.430.150	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.008.000	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.002.150	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.420.000	
5.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	3.050.000	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.050.000	
5.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	17.847.248	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.847.248	
5.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	30.610.000	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.610.000	
5.01.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	414.220.000	
5.01.02.2.01	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	388.872.000	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	157.862.000	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	231.010.000	
5.01.02.2.03	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	25.348.000	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	25.348.000	
5.01.03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	145.145.600	
5.01.03.2.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	75.158.600	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	8.877.400	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1.915.100	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7.002.000	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	39.999.800	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.885.000	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.479.300	
5.01.03.2.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	37.022.000	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	14.375.000	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	22.647.000	
5.01.03.2.03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	32.965.000	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	11.619.000	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	21.346.000	
5.02	<b>KEUANGAN</b>	179.423.465.203	
5.02.0.00.0.00.01.0000	<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	176.190.004.041	
5.02.0.00.0.00.01.0000	<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	176.190.004.041	
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	10.611.317.041	
5.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	10.527.043.733	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.527.043.733	
5.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	38.600.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.600.000	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.000.000	
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.498.308</b>	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.998.308	
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>21.175.000</b>	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.175.000	
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>165.056.674.400</b>	
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>649.460.000</b>	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	56.990.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	55.120.000	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	364.770.000	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	172.580.000	
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>156.497.207.400</b>	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	170.000.000	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4.625.000.000	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	151.533.653.400	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	168.554.000	
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>410.007.000</b>	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	157.373.000	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	152.280.000	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100.354.000	
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>7.500.000.000</b>	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	7.500.000.000	
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>522.012.600</b>	
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>522.012.600</b>	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	36.690.000	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	92.737.000	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	13.085.000	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	90.019.000	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	120.709.000	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	168.772.600	
<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.233.461.162</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.233.461.162</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.384.454.062</b>	
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.243.060.736</b>	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.243.060.736	
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>48.972.700</b>	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.871.000	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.072.700	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.029.000	
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>72.407.726</b>	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.407.726	



## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000	
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>20.012.900</b>	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.012.900	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>849.007.100</b>	
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>849.007.100</b>	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	86.582.100	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	187.890.000	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	569.945.000	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4.590.000	
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>2.461.971.797</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA</b>	<b>2.461.971.797</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA</b>	<b>2.461.971.797</b>	
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.049.971.797</b>	
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.954.974.849</b>	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.954.974.849	
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>50.973.000</b>	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.334.000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.639.000	
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.037.548</b>	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.037.548	
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>19.986.400</b>	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.986.400	
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>412.000.000</b>	
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>412.000.000</b>	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	412.000.000	
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>3.361.682.000</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA</b>	<b>3.361.682.000</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA</b>	<b>3.361.682.000</b>	
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>3.361.682.000</b>	
<b>5.04.02.2.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>3.361.682.000</b>	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.361.682.000	
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>31.062.500</b>	
<b>5.01.5.05.1.03.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>31.062.500</b>	
<b>5.01.5.05.1.03.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>31.062.500</b>	
<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>31.062.500</b>	
<b>5.05.02.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>31.062.500</b>	
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	31.062.500	
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>3.147.545.109</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>3.147.545.109</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>3.147.545.109</b>	
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.947.496.109</b>	
<b>6.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.886.637.662</b>	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.886.637.662	
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>25.155.500</b>	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.610.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	3.545.500	
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12.766.147</b>	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.766.147	
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>22.936.800</b>	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.936.800	
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>200.049.000</b>	
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>170.211.000</b>	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	74.460.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	58.820.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	18.231.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	18.700.000	
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>29.838.000</b>	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	17.760.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12.078.000	
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>21.504.232.426</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>KECAMATAN BAJAWA</b>	<b>5.912.334.606</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>KECAMATAN BAJAWA</b>	<b>3.894.197.515</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.894.197.515</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.818.936.298</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.818.936.298	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>35.538.850</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.039.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	2.999.850	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.500.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12.388.367</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.388.367	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>27.334.000</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.334.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>KELURAHAN BAJAWA</b>	<b>223.949.626</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>23.949.626</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>15.731.300</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.388.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	1.343.300	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.218.326</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.218.326	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>200.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>200.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	147.500.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	52.500.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>KELURAHAN TANALODU</b>	<b>224.630.989</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>14.630.989</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>5.730.300</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.387.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	1.343.300	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.900.689</b>	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.900.689	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>10.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>10.000.000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>200.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>200.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	145.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	55.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0003</b>	<b>KELURAHAN LEBIJAGA</b>	<b>223.529.079</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>23.529.079</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>15.731.300</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.388.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.343.300	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.797.779</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.797.779	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>200.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>200.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	190.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0004</b>	<b>KELURAHAN SUSU</b>	<b>224.676.214</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>24.676.214</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>15.681.300</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.338.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.343.300	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.994.914</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.994.914	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>200.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>200.000.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	200.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0005</b>	<b>KELURAHAN FAOBATA</b>	<b>224.136.760</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>24.136.760</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>15.731.000</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.335.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.344.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.052.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.405.760</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.405.760	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>200.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>200.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	140.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0006</b>	<b>KELURAHAN TRIKORA</b>	<b>222.899.677</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.899.677</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>5.731.300</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.388.000	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pnggandaan	1.343.300	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.168.377</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.168.377	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>210.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>210.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	142.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0007</b>	<b>KELURAHAN JAWAMEZE</b>	<b>226.802.888</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>26.802.888</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>15.731.150</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.388.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pnggandaan	1.343.150	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>11.071.738</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.071.738	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>200.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>200.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	160.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0008</b>	<b>KELURAHAN KISANATA</b>	<b>224.611.108</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>14.611.108</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>5.723.000</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.388.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pnggandaan	1.335.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.888.108</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.888.108	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>210.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>210.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	140.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	70.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0009</b>	<b>KELURAHAN NGEDUKELU</b>	<b>222.900.750</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.900.750</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>5.731.300</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.388.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pnggandaan	1.343.300	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.169.450</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.169.450	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>210.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>210.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>KECAMATAN GOLEWA</b>	<b>2.170.133.243</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>KECAMATAN GOLEWA</b>	<b>1.727.883.402</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.727.883.402</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.694.712.042</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.694.712.042	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>9.474.500</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pnggandaan	2.474.500	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.484.360	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.484.360	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.212.500	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.212.500	
7.01.0.00.0.00.02.0001	<b>KELURAHAN MATALOKO</b>	<b>221.125.159</b>	
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>21.125.159</b>	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.934.950	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.995.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	999.950	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.750.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.190.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.190.209	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.130.209	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>200.000.000</b>	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	175.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	
7.01.0.00.0.00.02.0002	<b>KELURAHAN TODABELU</b>	<b>221.124.682</b>	
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>21.124.682</b>	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.934.450	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.994.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	999.950	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.750.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.190.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.190.232	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.130.232	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>200.000.000</b>	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	
7.01.0.00.0.00.03.0000	<b>KECAMATAN BAJAWA UTARA</b>	<b>836.427.811</b>	
7.01.0.00.0.00.03.0000	<b>KECAMATAN BAJAWA UTARA</b>	<b>836.427.811</b>	
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>836.427.811</b>	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	761.502.658	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	761.502.658	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.848.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.848.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.865.149	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.865.149	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.212.004	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	612.004	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.600.000	
7.01.0.00.0.00.04.0000	<b>KECAMATAN GOLEWA SELATAN</b>	<b>759.323.018</b>	
7.01.0.00.0.00.04.0000	<b>KECAMATAN GOLEWA SELATAN</b>	<b>759.323.018</b>	
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>759.323.018</b>	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	727.080.130	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	727.080.130	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.192.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.192.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.459.288	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.459.288	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.591.600	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.591.600	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN GOLEWA BARAT	1.422.929.898	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN GOLEWA BARAT	1.198.470.843	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.198.470.843	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.153.760.146	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.153.760.146	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.553.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.653.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.900.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.068.697	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.068.697	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.088.500	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.088.500	
7.01.0.00.0.00.05.0001	KELURAHAN MANGULEWA	224.459.055	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.459.055	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.225.950	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.050.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.175.950	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.233.105	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.233.105	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	170.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30.000.000	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN AIMERE	1.857.006.812	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN AIMERE	1.425.253.461	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.425.253.461	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.383.965.119	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.383.965.119	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.000.350	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.350	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.287.992	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.287.992	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	
7.01.0.00.0.00.06.0001	KELURAHAN AIMERE	215.863.723	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.863.723	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.609.100	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.500.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.109.100	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.254.623</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.254.623	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>200.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>200.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	80.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.06.0002</b>	<b>KELURAHAN FOA</b>	<b>215.889.628</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.889.628</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>14.579.100</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.500.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	2.109.100	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.970.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.310.528</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.310.528	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>200.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>200.000.000</b>	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	101.800.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	98.200.000	
<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>KECAMATAN JEREBUU</b>	<b>837.871.213</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>KECAMATAN JEREBUU</b>	<b>837.871.213</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>837.871.213</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>801.132.878</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	801.132.878	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>13.542.000</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.542.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	5.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.196.335</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.196.335	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>20.000.000</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>KECAMATAN INERIE</b>	<b>1.169.202.583</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>KECAMATAN INERIE</b>	<b>1.169.202.583</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.169.202.583</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.139.357.562</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.139.357.562	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4.430.050</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.893.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	1.537.050	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.412.971</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.412.971	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>20.002.000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.002.000	
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>KECAMATAN SOA</b>	<b>1.383.756.330</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>KECAMATAN SOA</b>	<b>1.383.756.330</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.383.756.330</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.358.046.251</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.358.046.251	

## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.087.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.081.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.006.500	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.797.579	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.797.579	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.825.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.825.000	
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN WOLOMEZE	911.519.944	
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN WOLOMEZE	911.519.944	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	911.519.944	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	881.067.334	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	881.067.334	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.775.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.615.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.160.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.677.610	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.677.610	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN RIUNG	2.925.524.460	
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN RIUNG	2.518.459.610	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.518.459.610	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.465.949.878	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.465.949.878	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.074.550	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.168.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.906.550	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.439.182	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.439.182	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.996.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.996.000	
7.01.0.00.0.00.13.0001	KELURAHAN BENTENG TENGAH	200.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	147.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	53.000.000	
7.01.0.00.0.00.13.0002	KELURAHAN NANGAMESE	207.064.850	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.064.850	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	665.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	665.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.399.850	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.399.850	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN RIUNG BARAT	1.318.202.508	



## Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN RIUNG BARAT	1.318.202.508	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.318.202.508	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.258.765.508	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.258.765.508	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.547.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.997.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.550.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.890.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.890.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.067.583.619	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.067.583.619	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.067.583.619	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.361.000.469	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.322.734.203	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.322.734.203	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.998.450	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.263.000	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.735.450	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.682.616	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.682.616	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.585.200	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.585.200	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	708.583.200	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	708.583.200	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	708.583.200	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	997.999.950	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	997.999.950	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	997.999.950	

## BAB V

### RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Ngada mengalokasikan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 45.615.548.048-, yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 45.615.548.048-,
- b. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 53.171.541.006,- yang direncanakan untuk Penyertaan Modal ke Bank NTT sebesar Rp. 10.171.541.006,- Pembentukan Dana Cadangan Pemilukada sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp. 40.000.000.000,-

Pengeluaran pembiayaan dalam bentuk Penyertaan Modal ke Bank NTT sebesar Rp. 10.171.541.006,- adalah pencatatan kembali selisih Kas Daerah pada Bank NTT.

#### Rencana Pembiayaan Daerah pada RAPBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023 digambarkan sebagai berikut:

Kode	Uraian	Jumlah
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>45.615.548.048</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.615.548.048
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	45.615.548.048
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>53.171.541.006</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	3,000,000,000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10,171,541,006
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	40,000,000,000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>53.171.541.006</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(7,555,992,958)</b>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan adalah Surplus/(Defisit) Belanja dikurangi Pembiayaan Netto.

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Demikian kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Bajawa, November 2022

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGADA,**

**WAKILBUPATI NGADA,**

**BERNADINUS DHEY NGEBU, S.P.  
KETUA**

**RAYMUNDUS BENA, S.S.,M.HUM.**

**PETERUS NGABI  
WAKIL KETUA**

**ALOYSIUS SOA  
WAKIL KETUA**